

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Politik Internasional

Negara dan pasar merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan negara sebagai representasi politik dan pasar sebagai representasi ekonomi, yang dalam perjalanannya memiliki keterkaitan satu sama lain. Sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan usaha untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran dan dikombinasikan dengan sektor politik yang erat kaitannya dengan usaha mencapai kekuatan atau kekuasaan menjadikan negara dan pasar dalam level internasional disebutkan sebagai intisari dari ekonomi politik internasional (Jackson & Serensen, 2014).¹

Menurut Gilpin, Ekonomi Politik Internasional adalah interaksi antara negara dan pasar. Ekonomi Politik Internasional berfokus pada distribusi nilai kekayaan, kebutuhan materil, keamanan dan ketertiban, keadilan dan kebebasan. Gagasan-gagasan mengenai pendekatan ini awal mulanya karena munculnya fenomena negara berkembang sebagai aktor dalam pencaturan politik dunia dan kekuatan mereka berdasarkan tuntutan ekonomi. Sedangkan secara akademik, ekonomi politik internasional merupakan perkembangan dari ilmu ekonomi internasional dan ilmu politik, yang pada awalnya membahas tentang kemerosotan

¹ Fokus utama dalam kajian ekonomi politik internasional adalah bagaimana dinamika pertarungan politik yang terjadi atau terlaksana antara negara yang kuat dengan negara yang lemah justru membentuk serangkaian kebijakan ekonomi yang dianut oleh pemerintah negara terkait. Dalam upaya memahami perkembangan dalam ekonomi global, diperlukan pula pemahaman berkenaan dengan teori-teori ekonomi, mengetahui pola interaksi politik antar pemerintah, kebijakan domestik dari masing-masing negara, hingga mengenal institusi organisasi politik internasional.

nilai tukar produk ekspor negara berkembang, kritik terhadap *comparative cost* dan *comparative advantage*, munculnya teori merkantilisme, berkembangnya ilmu ekonomi pembangunan, serta munculnya studi regional, hubungan transnasional, dan internasional (Masoed, 1994).²

Pengaplikasian unsur ekonomi (pasar) dan politik (negara) dalam perdagangan internasional telah menjadi contoh yang lumrah dalam dunia internasional. Secara normatif perdagangan internasional terjadi karena setiap negara dengan mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan Sumber Daya Alam (SDA), iklim, penduduk, spesifikasi tenaga kerja, geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial dan politik. Dari perbedaan tersebut terjadilah proses pertukaran yang secara luas yang dikenal sebagai perdagangan internasional (Hady, 2001). Namun dalam perkembangannya, tujuan dari perdagangan internasional ternyata tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi (sumber daya), namun terdapat unsur-unsur politik dalam pencapaian kepentingan suatu negara. Ketika terjadi perdagangan internasional, maka tidak semata-mata dalam upaya pemenuhan kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri namun terdapat juga unsur politik yang mendasari tindakan negara tersebut untuk melakukan perdagangan internasional.

² Melalui kajian ekonomi politik internasional, akan didapatkan gambaran jelas mengenai adanya pertentangan yang muncul antara meningkatkan interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya.

2.2 Merkantilisme

Teori selanjutnya yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis perang dagang ini adalah merkantilisme, merkantilisme secara spesifik menjelaskan dari sisi ekonomi negara. Merkantilisme pada awal mulanya hadir pada abad 16 Masehi sampai dengan abad 18 Masehi di Eropa, dimana pada saat itu beberapa tokoh telah bertindak secara merkantilisme, namun istilah merkantilisme secara resmi diperkenalkan oleh Adam Smith melalui bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations*. Menurut merkantilisme hal terpenting yang menunjukkan supermasi kekuatan dan kesejahteraan dari sebuah negara adalah tingginya angka ekspor dan kepemilikan harta berupa emas dan logam berharga lainnya (Dominick Salvatore, 2021). Bagi merkantilisme, surplus pada neraca perdagangan merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sehingga dalam hubungan perdagangan, sangat penting bagi negara untuk menjaga keadaan neraca perdagangan dalam keadaan surplus. Dalam merkantilisme sangatlah penting jika suatu negara bisa ekspor lebih banyak ke negara lain daripada impor dari negara lain (Drezner, 2017). Kemudian, merkantilisme sendiri memiliki pandangan bahwa hubungan perdagangan merupakan *zero-sum game* yang berarti pada situasi perdagangan akan ada yang menang dan ada yang kalah, merkantilisme tidak menganut istilah *win-win cooperation*.

Melihat dari perspektif kebijakan, merkantilisme merupakan teori yang mewakili pertahanan bagi regulasi negara dan kebijakan proteksionis negara (Herlitz, 1964). Menurut Adam Smith, dasar dari teori merkantilisme adalah keseimbangan dagang yang dapat menguntungkan. Teori ini mendukung langkah

pemerintah untuk meregulasi ekonomi negara yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan negara dalam persaingan dengan negara lain (Yu, 2019).³ Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Montaigne yang mengatakan bahwa negara tidak akan mendapatkan keuntungan tanpa ada negara lain yang dikorbankan atau dirugikan. Merkantilisme muncul untuk pembentukan negara yang kuat secara ekonomi nasional (Herlitz, 1964). Sehingga negara adakalanya mengeluarkan kebijakan yang merugikan bagi negara lain demi mempertahankan serta memperkuat kekuatan negaranya (Hunt et al., 1981). Bagi merkantilisme, ketergantungan dengan negara lain sangat perlu untuk dihindari. Beberapa strategi yang negara lakukan berdasarkan konsep merkantilisme untuk memperkuat perekonomian negara adalah kebijakan hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Kebijakan hambatan tarif dan hambatan non-tarif perlu dilakukan karena merkantilisme menganggap keterbatasan sumber daya yang ada di dunia perlu disikapi negara dengan mengeluarkan produk yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat harga dalam perdagangan lintas negara (Wiener & Schrire, 2009).

Dalam teori merkantilisme terdapat konsep proteksionisme⁴. Pasar bebas yang awalnya dipercaya dapat meningkatkan aktivitas perdagangan internasional

³ Pendekatan merkantilisme melihat tujuan dari kegiatan ekonomi adalah produksi bukan konsumsi, kekayaan negara bukanlah jumlah dari kekayaan individu namun kekayaan negara dilihat dari bagaimana negara mampu secara simultan mendorong produksi, meningkatkan ekspor, dan menekan konsumsi domestik. Meskipun menekankan pada produksi, jumlah barang yang banyak didalam negara tidak diperbolehkan, melainkan dengan tingkat produksi yang tinggi dan konsumsi domestik yang rendah, ekspor di dorong semakin meningkat, yang akan meningkatkan kekayaan dan power negara. Merkantilis menganjurkan upah rendah bagi para pekerja sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif bagi negara dalam perdagangan internasional. Jadi tujuan kegiatan ekonomi didefinisikan dalam hal output nasional dan bukan dalam hal konsumsi nasional.

⁴ Proteksionisme adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melindungi maupun meningkatkan sistem ekonomi negaranya dengan cara melakukan optimalisasi terhadap produk maupun usaha dalam negeri. Kebijakan proteksionisme merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi dan optimalisasi kualitas maupun kuantitas produk domestik.

seiring berjalannya waktu dinilai oleh sebagian kalangan dapat membahayakan produk domestik bagi beberapa negara. Friedrich List dalam bukunya yang berjudul *The National System of Political Economy* pada tahun 1841, mengemukakan bahwa untuk menghadapi perdagangan internasional atau liberalisasi, sumber kekuatan dari negara adalah kekuatan produktivitasnya. Friedrich List berpendapat bahwa negara memiliki peran penting dalam bidang ekonomi untuk melindungi dan memperbesar kekuatan produktivitas nasional melalui pengembangan industri, yang dimana industri tersebut berhubungan erat dengan teknologi, politik, perbaikan infrastruktur, urbanisasi, dan alat mencapai kesejahteraan (Friedrich List, 2011). Friedrich List mengemukakan pendapat bahwa dalam menghadapi pasar bebas ini negara perlu memperkuat aktivitas produksi (Levi-Faur, 1997). Friedrich List juga berpendapat bahwa memperkuat produksi ini memerlukan peran pemerintah dengan melindungi serta memperbesar jumlah produksi melalui pengembangan industri dan tindakan lainnya berupa kebijakan. Hal tersebut merupakan ide awal proteksionisme perdagangan menurut Friedrich List. Perdagangan secara proteksionisme merupakan upaya dari pemerintah melalui kebijakan perdagangan yang ditujukan untuk membantu memperkuat produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Dengan kebijakan proteksionisme, negara dapat menyeimbangkan dan memperkuat perekonomian negara melalui cara memperkuat daya saing produk domestik terhadap produk luar negeri (Georgiadis & Gräßl, 2016).

Kebijakan proteksionisme merupakan salah satu strategi pemerintah untuk melindungi keberlangsungan ekonominya dengan cara melindungi berbagai

produk dalam negeri. Pemerintah memiliki kewenangan sepenuhnya dalam memutuskan sebuah kebijakan suatu negara yang tujuannya untuk memajukan perekonomian negara tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan proteksionisme salah satunya adalah dengan memberlakukan hambatan tarif bagi produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri sehingga harga produk tersebut lebih mahal daripada produk domestik atau bisa juga dengan menurunkan biaya produksi bagi produk domestik (Abboushi, 2010). Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan bisa juga dalam bentuk hambatan non-tarif seperti pembatasan kuota, dengan membatasi jumlah produk tertentu dari luar negeri yang bisa masuk ke dalam negeri, maka harga produk dari luar negeri akan mengalami kenaikan harga akibat dari jumlah yang terbatas sehingga pembeli akan cenderung mencari produk yang lebih murah yaitu produk domestik (Coughlin & Wood, 1989). Kebijakan lainnya dapat berupa subsidi, subsidi merupakan bantuan keuangan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada perusahaan atau produsen produk tertentu. Dengan adanya bantuan keuangan dari pemerintah maka biaya produksi yang dikeluarkan produsen akan menurun sehingga harga jual akan semakin murah, meskipun pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan kebijakan subsidi ini, keefektifannya sama dengan kebijakan hambatan tarif dan kebijakan hambatan non-tarif yang memberikan keuntungan kepada pemerintah, karena keduanya sama-sama mampu membantu memperkuat produk domestik di pasar internasional (Coughlin et al., 2002).

Pada masa perdagangan bebas seperti sekarang, negara perlu memberlakukan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif terhadap aktivitas

perdagangan yang memasuki negara mereka, pemberlakuan hambatan tarif dan hambatan non-tarif ini diperlukan untuk memberi batasan yang jelas ditengah perdagangan yang bebas. Dengan begitu negara tetap bisa menjaga dan memperkuat produk domestik dan perdagangan nasionalnya.

Merkantilisme dan proteksionisme dapat membantu peneliti dalam menjelaskan tindakan AS dalam usahanya untuk memperbaiki defisit neraca perdagangannya dengan Tiongkok melalui pemberlakuan hambatan tarif dan hambatan non-tarif serta menjelaskan mengapa surplus neraca perdagangan sangat penting untuk dicapai bagi AS dalam perang dagang dengan Tiongkok.

2.3 Neoclassical-Realism

Neoclassical-Realism atau Realisme neo klasik merupakan pendekatan atau paradigma yang menggabungkan teori realis klasik dan teori neo realis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa tindakan negara dapat dijelaskan dengan variabel sistemik (penyebaran kekuasaan di beberapa negara), variabel kognitif (persepsi terkait ancaman), dan variabel domestik (lembaga negara atau tokoh masyarakat) yang mempengaruhi kekuasaan. Pendekatan ini melegitimasi mengenai *Balance of power* ala neo realis tetapi pendekatan ini beranggapan bahwa jika pemimpin suatu negara gagal melakukan penyeimbangan maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem internasional (Davidson, 2008).

Dalam pendekatan ini karakteristik suatu negara terbagi menjadi dua bagian yaitu *Status Quo State* dan *Revisionist State*. Jacek Kugler dan A.F.K. Organski berpendapat bahwa negara dengan status quo sebagai pihak yang telah berpartisipasi dalam merancang “aturan main” dan menerima *benefit* dari aturan

ini. Sedangkan negara revisionis menginginkan tempat baru untuk diri mereka sendiri dalam masyarakat internasional. Negara-negara Revisionis menyatakan “ketidakpuasan umum” terhadap posisi mereka dalam sistem sehingga mereka memiliki keinginan untuk menyusun kembali aturan yang digunakan dalam hubungan antar negara. Indikator yang paling jelas dalam mengidentifikasi negara revisionis adalah sudut pandang para pemimpin negara tersebut. Menurut Randall Schweller, negara revisionis menghargai apa yang mereka miliki saat ini, tetapi menginginkan lebih dari apa yang mereka miliki saat ini. Mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada untuk mengubah status quo (Johnston, 2003).

Kekuatan revisionis digambarkan sebagai negara yang sangat peduli terhadap prestise di atas semua pertimbangan, dan berusaha merombak sistem serta ketertiban internasional untuk keuntungannya sendiri (Combes, 2011). Ketidakpuasan memotivasi mereka untuk tidak terlalu memperdulikan kekuatan dominan negara lain, sehingga negara revisionis cenderung mengabaikan kekuatan dominan dan lebih berfokus pada usaha mereka untuk membuat sistem berubah. Ketika kekuatan negara status quo lebih kuat dibandingkan negara revisionis, maka status sistem akan tetap stabil. Namun, jika kekuatan negara revisionis lebih kuat daripada negara status quo, maka sistem pada akhirnya akan berubah.

Jika dilihat dari sistem internasional yang terjadi sekarang kita bisa melihat bahwa kekuatan dominan dipegang oleh AS. Sementara itu, Tiongkok hanyalah negara yang memiliki power yang berada di bawah negara dominan

yaitu AS. Tiongkok merasa tidak puas dengan posisinya di sistem karena dengan posisi yang lebih lemah tersebut membuat Tiongkok lebih mudah terancam terutama dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, Tiongkok ingin merubah sistem internasional yang telah ada dengan melakukan industrialisasi di negaranya. Tiongkok ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa mengguguli status quo yang dimiliki oleh AS lewat pertumbuhan ekonomi negaranya yang mapan. Dari hal tersebutlah dapat dilihat bahwa Tiongkok berusaha menjadi *Revisionist State*.

2.4 Balance of Interest

Balance of interest merupakan konsep dari Neo klasik realisme yang berupaya merevisi konsep *balance of power* dan *balance of threat*. Menurut Kevin Sweeney dan Paul Fritz, teori *balance of power* dari pendekatan neo realisme yang diinisiasi oleh Kenneth Waltz hanya memberikan sedikit data empiris untuk mendukung argumennya mengenai *balancing* dan *bandwagoning* di antara negara-negara kuat (Sweeney & Fritz, 2004). Disisi lain, Randall Schweller mengkritik Kenneth Waltz yang menganggap semua *great powers* atau kekuatan besar sama seperti *unit*. Dengan kata lain, bahwa perilaku negara semua sama, baik itu kapabilitas dan kepentingannya (Banchoff, 2023). Kemudian, teori *balance of power* direvisi oleh Stephen M. Walt dengan menambahkan variabel lain yakni *threat* (ancaman) dan teorinya disebut *balance of threat*. Setelah itu, Randall Schweller melalui artikel jurnalnya yang berjudul "*Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist States Back In*", mengkritik teori *balance of threat* melalui kerangka berpikir *neoclassical-realism*. Schweller mengusulkan

teori yang bernama *Balance of Interest* dengan menambahkan variabel lain yaitu *interest* (kepentingan). *Balance of Interest* berupaya menjelaskan bagaimana negara merespons peluang untuk mendapatkan keuntungan (Randall L. Schweller, 2010).

Penelitian ini menggunakan teori *balance of interest* dari pendekatan *neoclassical-realism* karena teori ini mampu menjelaskan bagaimana distribusi kapabilitas dan kepentingan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Bagian penting dari teori ini adalah struktur sistem internasional dan kepentingan negara. Kekuatan relatif *Great Powers* menentukan struktur sistem internasional. Sementara itu, dalam tingkat unit, negara diidentifikasi sebagai apakah negara tersebut puas dengan status-quo atau tidak. Dengan memasukkan unit serta kepentingan dan identitas mereka, stabilitas sistem serta perilaku negara dapat dijelaskan (Banchoff, 2023).

Konsep ini dapat bermakna ganda karena mencakup kepentingan negara di level unit maupun level sistemik (Randall L. Schweller, 2010). Pada level unit, teori *balance of interests* mengacu pada berapa banyak biaya yang harus dibayar negara untuk mempertahankan nilai yang dimilikinya, termasuk berapa banyak biaya yang harus dibayar untuk memperbesar nilainya. Sementara pada level sistemik mengacu pada seberapa kuat *Status Quo State* dan *Revisionist State*

Untuk menjelaskan konsep ini, Randall L. Schweller menekankan adanya “range” yang bisa menjelaskan posisi dan kepentingan suatu negara. Range ini didalamnya terdapat negara yang mempertahankan status quo dan negara yang

ingin perubahan atau revisi terhadap sistem. Range of State Interest ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Range of State Interest

	Negara yang puas terhadap (status quo)		Negara yang tidak puas (revisionis)	
	<i>Lion</i>	<i>Lamb</i>	<i>Jackal</i>	<i>Wolves</i>
Kepentingan	<i>Self Preservation</i>	<i>Self Abnegation</i>	Tujuan yang terbatas	Tujuan yang tidak terbatas
Tindakan	<i>Balancing</i> atau <i>Buckpassing</i>	<i>Appeasement and wave-of-the-future bandwagoning; distancing</i>	<i>Jackal Bandwagoning</i>	Resiko Agresi

Sumber: Range of State Interest (Randall L. Schweller, 1996).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa *Lion* merupakan negara yang akan membayar tinggi untuk melindungi apa yang mereka miliki. Sebagai pihak yang merasa puas terhadap sistem, negara ini akan mempertahankan kondisi yang telah ada (status quo). Oleh karena itu, negara *Lion* cenderung melakukan tindakan *balancing* atau *buckpassing* untuk mempertahankan posisi dan memaksimalkan keamanan mereka (Randall L. Schweller, 1996). *Balancing* merupakan tindakan penyeimbangan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang berpotensi menciptakan ancaman agresi. Sedangkan, *Buckpassing* merupakan

strategi suatu negara untuk mencegah agresor dengan memanfaatkan negara lain sementara negara ini tetap mematuhi pedoman yang berlaku (Coogan & Mearsheimer, 2002).

Sementara itu, *Lamb* merupakan negara yang akan membayar rendah untuk pertahanan dan perluasan nilai mereka. Dalam sistem internasional, negara tipe ini merupakan negara yang memiliki kapabilitas lemah, baik dari segi politik, ekonomi, maupun pertahanan. Oleh karena itu, untuk menjaga dirinya tetap aman, negara ini hanya bertujuan untuk *Self-abnegation* (Randall L. Schweller, 2010). Ketika suatu negara tidak bisa mengikuti dinamika keseimbangan atas polaritas kekuatan yang ada dalam sistem internasional, maka negara tersebut menjadi rentan terhadap sasaran dominasi dan ekspansi negara lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak puas dengan sistem internasional yang ada adalah negara-negara yang berada dalam *range jackal* dan *wolves*. *Jackal* merupakan negara yang akan membayar tinggi untuk mempertahankan apa yang mereka miliki, tetapi mereka juga akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk memperluas nilai-nilai yang mereka miliki. Namun, negara dalam *range* ini cenderung tidak ingin mengambil resiko sehingga negara ini lebih sering mengikuti *Lion* (negara pemimpin status quo) yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, negara dengan *range Jackal* sering memilih tindakan *bandwagoning*.

Walaupun *Jackal* dan *Wolves* merupakan pihak yang tidak puas terhadap status quo, tetapi *Wolves* merupakan pihak yang lebih ambisius untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, negara dalam *range* ini cenderung bersedia mengambil resiko besar untuk memperbaiki kondisi mereka yang

dianggap tidak adil dan tidak dapat ditoleransi lagi. Tanpa rasa takut akan kehilangan dan resiko yang begitu besar, negara yang berada dalam range ini akan berusaha mengejar ekspansi secara agresif dan serampangan (Randall L. Schweller, 2010).

Dalam sistem internasional sekarang, kita dapat melihat kalau AS merupakan negara yang sudah memiliki kekuatan besar alias *Great Powers*. Sementara itu, Tiongkok merupakan negara yang berusaha untuk mengubah keadaan negaranya dalam sistem internasional. Pada penelitian ini peneliti akan mengkategorikan AS sebagai *Lion*. Sedangkan Tiongkok merupakan negara yang sedang menuju *Range Wolves*. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok sedang berusaha untuk membuat negaranya diakui serta memperjuangkan posisinya agar diperhitungkan di sistem internasional.

Dalam menganalisis posisi AS sekarang, peneliti memilih berfokus pada *Range Lion*, yang dimana negara dalam *range* ini memiliki tujuan utama untuk *Self Preservation*. Tujuan *Self Preservation* ini mempunyai arti kalau negara tersebut berupaya untuk memaksimalkan keamanan (*Security Maximizer*) dan mempertahankan posisi (*Maintain Position*). Untuk mencapai maksimalisasi keamanan tersebut maka langkah atau kepentingan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan identitas independen

Setiap negara yang memiliki identitas yang menjadi ciri khasnya akan dipertahankan. Negara *Lion* sendiri biasanya memiliki identitas sebagai

pemenang perang atau negara pemilik ekonomi terbesar dan keamanan terkuat. Identitas inilah yang akan dipertahankan oleh negara *Lion*.

2) Mempertahankan perdagangan positif

Dalam upaya memaksimalkan keamanannya, setiap negara juga perlu memperhatikan bidang ekonomi. Perhatian tersebut biasanya meliputi pertumbuhan ekonomi domestik dan kegiatan ekspor-impor dengan negara lain (Schweller, 1997).

3) Meningkatkan integritas fungsional

Negara yang sedang berada dalam *range Lion* harus bisa mengintegrasikan berbagai macam kepentingan yang ingin dicapai oleh unit-unit dalam lingkup domestiknya. Selain itu, negara juga perlu mempertimbangkan tekanan sistem internasional (Randall L. Schweller, 1996).

Sedangkan untuk mempertahankan posisi, maka negara ini harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Mempertahankan aliansi

Dalam mempertahankan posisi dalam sistem internasional, suatu negara diharuskan mempertahankan aliansinya yang bisa memberikan keuntungan untuk negara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan prestise negara *Lion* sebagai negara pelindung, terutama bagi aliansinya.

2) Mempertahankan prestise

Dengan menduduki posisi pemimpin dalam sistem internasional, maka negara *Lion* akan mempertahankan posisi dirinya sebagai penjaga ketertiban dunia. Negara ini tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap aliansinya dari ancaman pihak lain.

3) Mencegah agresi (*Frightened the Wolves*)

Sebagai pengelola sistem internasional, negara *Lion* akan memberikan peringatan bahkan teguran bagi pihak manapun yang berpotensi mengancam sistem internasional yang telah didominasinya selama ini (Randall L. Schweller, 2010).

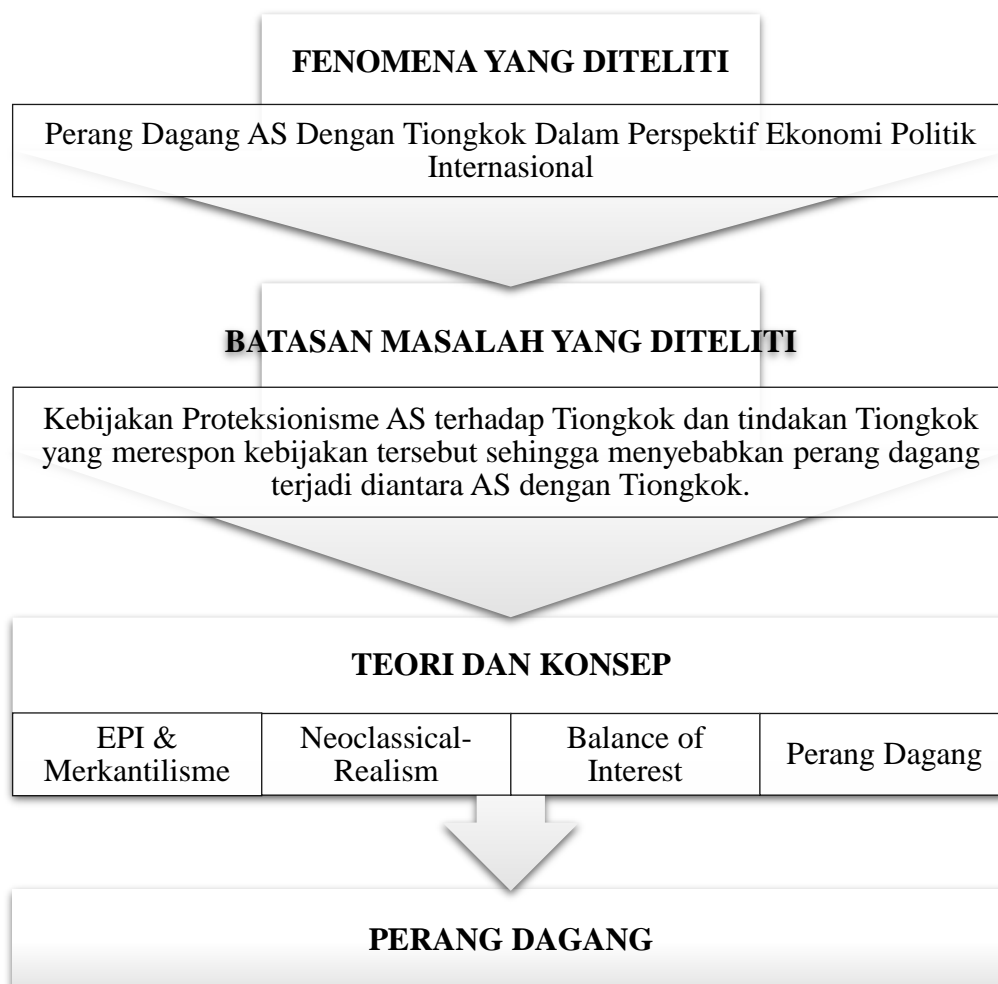
2.5 Perang Dagang

Dalam konteks perdagangan internasional, hubungan dagang antar negara bisa melahirkan fenomena perang dagang. Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan melibatkan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif dalam perdagangan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Menurut James Chen perang dagang merupakan sengketa ekonomi dalam perdagangan yang diakibatkan ketika kepentingan nasional dari suatu negara bertentangan dengan kepentingan nasional negara lain (James Chen, 2022). Sedangkan menurut Cambridge Dictionary perang dagang merupakan “*a situation in which two or more countries raise import taxes to try to protect their own economies*” (*Trade War*, n.d.).

Konsep perang dagang kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah situasi ketegangan antar negara akibat dari gagalnya kerjasama perdagangan yang

dibarengi dengan aksi pemberlakuan hambatan perdagangan baik berupa hambatan tarif (pemberlakuan kenaikan pajak atau bea masuk barang impor) maupun hambatan non-tarif (penutupan akses, regulasi pembatasan masuk barang impor, serta hambatan lisensi) yang ditujukan kepada negara lain yang didasari oleh berbagai alasan tertentu.

2.6 Kerangka Pemikiran



Hubungan dagang antara AS dengan Tiongkok yang semula mengalami keuntungan kini mengalami defisit neraca perdagangan sehingga AS mengeluarkan kebijakan merkantilisme berupa proteksionisme terhadap produk yang berasal dari Tiongkok. **Merkantilisme** sendiri dalam **Ekonomi Politik Internasional** memiliki pengertian meregulasi ekonomi negara yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan negara dalam persaingan dengan negara lain. Sehingga tindakan AS yang mengeluarkan kebijakan hambatan tarif dan hambatan non-tarif terhadap produk Tiongkok dianggap sebagai tindakan

merkantilisme dalam memproteksionis industri ekonomi negaranya dari serbuan produk Tiongkok.

Dengan kata lain tindakan AS tersebut membawa hubungan dagang dengan Tiongkok menjadi perang dagang yang penuh konflik kepentingan. Dalam menganalisis perang dagang tersebut, peneliti menggunakan teori **Neo-classical realism** untuk membedah faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perang dagang dan bagaimana respon Tiongkok terhadap kebijakan proteksionisme AS dapat di teliti lebih lanjut menggunakan teori **Balance of Interest**.